

PEMETAAN SOSIAL-POLITIK KELOMPOK ETNIK CINA DI INDONESIA

Amri Marzali

Akademi Pengajian Melayu-Universiti Malaya

ABSTRACT

This article presents a brief and comprehensive picture of the sociocultural life of the Indonesian Chinese society in Indonesia. The paper covers historical, demographic, legal, economic, political, and cultural aspects. It aims to update the data and information given by Mackie and Coppel (1976). Some observations are derived based on field research on Chinese-Pribumi relations in several cities in Indonesia, such as Jakarta, Solo and Tangerang.

The paper compiles several dispersed sources of information to give a brief comprehension of the sociocultural life of the Indonesian Chinese society in Indonesia.

PENGANTAR

Makalah ini memberikan satu gambaran umum tentang beberapa aspek penting dalam kehidupan kelompok etnik Cina di Indonesia. Pusat pembahasan adalah aspek sejarah, kependudukan, kedudukan legal, ekonomi, politik, dan kultural, yang sebagian besar merupakan hasil kajian kepustakaan, yang didukung oleh pengalaman kajian lapangan yang pernah dilakukan oleh penulis di Jakarta, Solo, dan Tangerang, dengan topik umum hubungan sosial Cina-Pribumi.

Selama ini data dan informasi dasar mengenai masyarakat etnik Cina di Indonesia, yang ditulis oleh sarjana-sarjana Barat dan orang-orang Cina Indonesia, berserak di berbagai sumber. Maka tulisan ini merupakan kompilasi dari berbagai-bagai sumber tersebut, sehingga dengan sekali baca peneliti akan mendapatkan data dasar tersebut. Tulisan ini perlu bagi peneliti dan mahasiswa perguruan tinggi yang berada pada peringkat awal dalam kajian tentang keanekaragaman sosiokultural di Indonesia. Makalah ini, dalam kapasitas tertentu, merupakan pemutakhiran (*updating*) dari Bab "A Preliminary Survey" tulisan Mackie dan Coppel dalam buku *The Chinese in Indonesia* (1976).

SIAPAKAH ORANG CINA INDONESIA?

Secara rasial, orang Cina dan mayoritas Pribumi Indonesia (“Deutero-Melayu”) adalah sama-sama Mongoloid. Belwood (1985: 69 – 101) menyebut Pribumi Indonesia sebagai *Southern Mongoloid type*, kecuali sebagian penduduk Indonesia bagian timur yang tergolong ke dalam tipe Melanesian dan “Proto-Melayu,” dan campuran Melayu-Melanesian.

Dengan kenyataan seperti ini maka bukan hanya Skinner, seorang peneliti Barat asing, yang ragu dalam menentukan apakah seseorang Indonesia yang ditemuinya di jalanan di kota besar Jakarta adalah Pribumi atau keturunan Cina, bahkan orang Indonesia sendiri dapat terperangkap ke dalam teka-teki yang sama, bila pihak yang dihadapinya itu tidak cukup kental ciri-ciri rasnya (Skinner 1963). Keadaan ini akan semakin membingungkan kalau berhadapan dengan orang *Cina Peranakan* - yang merupakan porsi terbesar kelompok etnik Cina di Indonesia. Mana yang Cina, mana Manado, dan mana yang Dayak?. Singkatnya, kata Skinner, batasan yang memadai apakah seseorang itu adalah warga keturunan Cina, tidaklah dapat ditentukan melalui ciri-ciri ras (fisik), tetapi melalui identifikasi sosio-kultural.

Pada masa Skinner, sebelum tahun 1960-an, satu-satunya ciri kultural yang bisa dipercaya tentang jati diri orang Cina dan keterikatannya dengan kelompok keturunan Cina adalah penggunaan nama keluarga Cina, atau nama “tiga suku kata.” Namun penggunaan nama Cina ini tidak digalakkan lagi di Indonesia sejak pergantian pimpinan Indonesia dari Ir. Soekarno kepada Jenderal Angkatan Darat Soeharto pada tahun 1967.

Seterusnya, sebelum periode Orde Baru 1967, di beberapa tempat tertentu di Indonesia seperti Bagan Siapi-api (Riau), atau Singkawang (Kalimantan Barat), orang dengan mudah mengenali warga kelompok etnik Cina (KEC) melalui bahasa percakapan yang diucapkan. Ketika berbicara dengan sesama warga keturunan Cina, mereka akan menggunakan salah satu dialek Cina, dan bila berhadapan dengan orang Pribumi mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan intonasi dan artikulasi bahasa etnik Cina. Sejak 1967, di mana semua orang, apalagi warga keturunan Cina, digalakkan untuk berbicara dalam bahasa Indonesia, maka ciri-ciri pengenalan melalui bahasa percakapan ini pun makin sukar dikenali.

Dari segi keagamaan (kepercayaan), sebelum Orde Baru, sebagian besar warga keturunan Cina adalah pengikut kepercayaan Samkau (Tridarma), yaitu kombinasi tiga ajaran Konghucu-Tao-Budha, atau pemeluk agama tradisional Cina Shenisme, dengan upacara-upacara yang khas warisan budaya Cina (Gondomono 2002: 7). Setelah tahun 1967, di mana setiap orang Indonesia diwajibkan untuk mengikuti salah satu dari 5 agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha maka sebagian besar warga keturunan Cina mengaku sebagai penganut Budha, atau berpindah agama yang pada umumnya ke agama Nasrani. Setelah itu mereka mengubah namanya sesuai dengan nama yang umum di kalangan pengikut agama Nasrani tersebut. Begitu juga halnya dengan upacara-upacara tradisional Cina yang sebagian dilaksanakan secara besar-besaran dan terbuka, menjadi dilarang oleh Pemerintah Orde Baru.

Dari segi kewarganegaraan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Pribumi Indonesia jelas berwarganegara Indonesia sejak semula, sementara itu warga keturunan Cina tidak jelas kedudukannya sampai akhir tahun 1950an. Antara tahun 1955 sampai tahun 1960 terjadi perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina untuk menentukan kedudukan kewarganegaraan keturunan Cina di Indonesia. Dari perundingan itu muncul secara garis besar tiga jenis kelompok etnik Cina menurut status kewarganegaraannya, yaitu warganegara Indonesia, warganegara Republik Rakyat Cina, dan *stateless*.¹

Nampaknya semakin berkembang masyarakat Indonesia, semakin berubah pula kehidupan sosio-kultural kelompok etnik Cina di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan makin ditinggalkannya adat, nilai, dan kepercayaan lama Cina oleh keturunan Cina tersebut. Pola kebiasaan menarik garis keturunan menurut prinsip patrilineal, pola menetap yang patrilokal, dan sistem perkawinan poligami berubah menjadi bilateral, neolokal, dan monogami. Nilai penghormatan terhadap orang tua yang sangat berlebihan, solidaritas klen, penghormatan terhadap arwah leluhur, dan *money mindedness* mulai berganti menuju kepada kecenderungan sikap individualistis, sekuler, dan demokratis. Arwah leluhur meski masih tetap dihormati, tidak lagi menduduki kedudukan yang sangat penting seperti dulu.

¹ Nampaknya mereka yang *stateless* inginnya menjadi warganegara Taiwan, tapi karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan maka mereka menjadi tidak jelas kewarganegaraannya.

Dengan adanya situasi seperti yang diuraikan di atas, muncul pertanyaan: bagaimana seseorang dapat mengenali warga keturunan Cina di Indonesia? Nampaknya sukar, tapi nyatanya kelompok etnik Cina sendiri tetap dapat mempertahankan sifat-sifat eksklusif dan endogami mereka. Bagaimana mereka mengenali bahwa seseorang itu adalah Cina? Kalau ini memang merupakan kenyataan yang berlaku maka penarikan garis sosial Pribumi dan non-Pribumi secara sosiologis nampaknya masih tetap punya makna di Indonesia sampai masa kini.

ISTILAH UNTUK MENYEBUT ORANG CINA INDONESIA.

Istilah “Cina” untuk mengacu kepada orang Cina secara umum, atau warga keturunan Cina Indonesia secara khusus, tidaklah berasal dari orang Cina, tapi dari orang Eropa yang mengaitkan dengan satu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada 225-206 SM, yaitu dinasti Qin (Chin). Sebenarnya orang Cina yang ada di Indonesia kini adalah keturunan dari orang Han, yaitu kelompok mayoritas yang membentuk 94 persen dari total penduduk Republik Rakyat Cina, yang secara linguistik terpecah lagi ke dalam berbagai suku-bangsa, antara lain yang terkenal di Indonesia adalah Kanton (Kwitang), Teochiu, Hoklo, Hinghua, Hokcia, Hainan, Hakka, dan Hokkian (Gondomono 2002: 3).

Di Indonesia, sebagian ahli, misalnya Mely G. Tan, menyebut orang Cina Indonesia ini dengan nama “golongan etnis Tionghoa,” sebagian lain, misalnya George Yunus Aditjondro, menyebutnya dengan istilah “masyarakat Cina” atau “*tenglang*,” Slamet Martosudiro menyebutnya “Cina perantauan” atau “*hoakiau*,” juga umum disebut “non-Pribumi,” atau “golongan etnik Cina,” atau “ethnic Chinese,” atau “kelompok keturunan Cina,” atau “Warga Negara Indonesia keturunan Cina,” atau bahkan ada yang menyebut dengan istilah “WNI,” atau “turunan,” atau “Orang Cina” saja (Aditjondro 1973; Martosudiro 1973; Tan 1981; Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan 1994; Suparlan 1989; 1984; Jahja 1989; Suryadinata 1978a:3; Suryadinata et al 2003).

Dalam literatur sosiologi, kolektiva semacam warga keturunan Cina Indonesia ini biasanya disebut dengan istilah *ethnic group*. Penggolongan mereka ke dalam kelompok etnik Cina dalam kenyataannya dilakukan oleh mereka sendiri atas kesadaran sendiri berdasarkan persamaan ciri-

ciri sosio-kultural tertentu, atau oleh orang lain yang melihat mereka sebagai orang-orang yang memiliki ciri-ciri sosio-kultural yang sama.

Dalam tulisan ini, saya cenderung mengikuti konsep umum sosiologi dan menyebut orang Cina Indonesia ini sebagai “kelompok etnik Cina,” atau disingkat jadi KEC. Istilah ini hampir sama artinya dengan istilah yang digunakan oleh ahli sosiologi Mely G. Tan, yaitu “golongan etnis Tionghoa.” Mereka adalah orang Indonesia keturunan Cina atau “*Chinese descendants*.”

Satu ciri umum yang melekat pada kelompok ini, dan sekaligus juga merupakan pengikat mereka, adalah perasaan sebagai satu kelompok etnik yang khas, yang berbeda dari kelompok-kelompok etnik lain di mana mereka tinggal. Apakah yang mengikat mereka sebagai satu kelompok etnik? Untuk itu saya lebih suka mengikuti pemikiran de Vos (1982), yang mendefinisikan *ethnic group* sebagai:

a self-perceived group of people who hold in common a set of traditions not shared by the others with whom they are in contact. Such traditions typically include “folk” religious beliefs and practices, language, a sense of historical continuity, and common ancestry or place of origin.

(satu kelompok manusia yang melihat dirinya sendiri sebagai memiliki bersama seperangkat tradisi yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain dimana mereka hidup. Secara khas tradisi-tradisi tersebut adalah kepercayaan dan praktek keagamaan rakyat, bahasa, perasaan kesinambungan sejarah, dan nenek moyang bersama atau tempat asal yang sama).

Ringkasnya, definisi di atas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok etnik Cina (KEC) di Indonesia adalah mereka yang memandang dirinya sebagai orang keturunan Cina, karena mereka sama-sama merasa memiliki seperangkat ciri-ciri sosio-kultural yang khas. Ciri-ciri sosio-kultural tersebut adalah:

- i. sama-sama memiliki sistem kepercayaan yang khas yang mereka bawa dari daratan Cina, yaitu Samkau, atau Shenisme,
- ii. sama-sama berbicara dalam bahasa atau dialek suku-bangsa yang berasal dari daratan Cina,

- iii. mempunyai persamaan pengalaman sejarah, yaitu sebagai migran ke Indonesia,
- iv. sama-sama merasa berasal dari keturunan yang sama, yaitu keturunan Orang Cina atau Orang Han, dan
- v. sama-sama merasa berasal dari suatu tempat yang sama, yaitu daratan Cina.

Pada masa kini orang tidak dapat bicara tentang KEC dengan cara pukul rata seperti itu, khususnya setelah peristiwa pergantian Orde Lama ke Orde Baru di tahun 1967. Suryadinata misalnya, sangat keras menganjurkan agar sekurang-kurangnya membedakan *Cina totok* dari *Cina peranakan* (Suryadinata 1978a: 1-7; 1978b: 113-28). Yang lain, almarhum Junus Jahja, membedakan orang Cina muslim dari Cina non-muslim (Jahja 1989). Seorang Profesor Universitas Indonesia ahli Cina menyetujui keadaan heterogenitas dari warga kelompok etnik Cina itu, karena itu dikatakannya “sangat keliru jika kita memukul rata kelompok etnik Cina... dengan menggunakan stereotipe yang pada umumnya berkonotasi buruk.” (Gondomono 2002: 4).

SEJARAH MIGRASI DAN POPULASI KELOMPOK ETNIK CINA

Meskipun ada yang menyebutkan bahwa orang Cina sudah mengenal kepulauan Nusantara sejak sebelum Masehi, namun keterangan lebih lanjut: tentang daerah Nusantara yang mana, berapa jumlah orang Cina, apa kegiatan mereka, dan bagaimana bentuk hubungan mereka dengan daerah itu, tidak begitu jelas (Purcell 1980: 57). Setelah zaman Masehi, beberapa catatan berita Cina menyebutkan tentang perjalanan beberapa tokoh agama Budha dari daratan Cina ke India, dan singgah di berbagai tempat di Nusantara.

Para pendeta ini menulis tentang daerah dan masyarakat yang mereka kunjungi. Mereka antara lain adalah Fa Hsien yang singgah di sebuah daerah yang disebut “Jawa,” dalam perjalanannya antara Cina dan India, pada tahun 413 M (Masehi). Pendeta Budha Hwi Ning singgah di sebuah daerah yang disebut Holing (Jawa utara) pada tahun 664 M, dan Pendeta I Tsing singgah di Sriwijaya pada tahun 671 M (Masehi).²

² Untuk selanjutnya dalam tulisan ini digunakan angka tahun Masehi..

Sejak itu nampaknya kepulauan Nusantara mulai dikenal orang Cina, khususnya para penguasanya. Beberapa peristiwa yang terjadi kemudian memberi tanda tentang adanya hubungan diplomatik antara beberapa kerajaan di Nusantara dengan penguasa daratan Cina. Dikatakan bahwa mulai tahun 904, kerajaan Sriwijaya di pantai timur Sumatera mengirim utusan diplomatik dan dagang secara teratur ke Cina. Pada sekitar tahun 1200, tercatat dalam kitab *Chan Ju Kua* tentang adanya dua kerajaan kuat di Nusantara, yaitu Sriwijaya di Sumatera dan Kediri di Jawa.

Pada tahun 1289, kaisar Cina Kubilai Khan mengirim seorang utusan, yaitu Meng Ki, ke Singosari di Jawa Timur, meminta agar Singosari mengakui kedaulatan kerajaan Cina atas daerah mereka. Utusan tersebut ternyata telah diberi malu oleh Raja Singosari. Atas penghinaan ini, katanya, Kubilai Khan mengirimkan 10.000 serdadu untuk menghukum Singosari pada tahun 1292. Sebagaimana diketahui, ekspedisi ini menemui kegagalan karena diperdayakan oleh menantu Raja Singosari, Raden Wijaya. Sebagian dari tentara Kubilai Khan yang kocar-kacir itu katanya tertinggal di Jawa dan terserap menjadi penduduk setempat. Semua kejadian tentang hubungan antara Cina dengan Nusantara seperti yang diceritakan di atas tidak menyebutkan tentang sudah adanya komunitas migran Cina di suatu tempat tertentu di Nusantara.

Perantauan orang Cina ke Nusantara, khususnya untuk keperluan dagang, nampaknya baru muncul pada zaman dinasti Ming, persisnya pada akhir abad ke-14, ketika diberitakan adanya beberapa pedagang Cina yang menetap di Palembang dan Temasik (Singapura). Keadaan ini nampaknya terus berlanjut sampai pada zaman Kerajaan Melaka (yang berlangsung dari 1400 sampai 1511).³ Di Jawa, pada tahun 1416, seorang penulis Cina yang ikut ekspedisi Laksamana Cheng Ho, yaitu Ma Huan, melaporkan tentang adanya komunitas-komunitas pedagang Cina di kota-kota pantai utara Jawa (Robson 1981, mengutip dari Mills 1970).

Migrasi ke Nusantara dalam jumlah yang agak berarti pada masa berikutnya terjadi karena dua faktor yang saling mengait. Pertama

³ Pada suatu masa Raja Melaka telah mengirim utusan, yaitu Panglima Hang Tuah, ke Kerajaan Cina (Kassim Ahmad 1975).

adalah pemberontakan-pemberontakan di daratan Cina pada zaman pergantian kekuasaan politik dari dinasti Ming ke dinasti Manchu, yang mendorong keluar pihak yang kalah dan dikejar-kejar. Kejadian ini bersamaan dengan masuknya Orang Eropa ke daratan Cina pada awal abad ke-16, yang membuat jalan ke Laut Selatan (Nan Yang), khususnya ke Nusantara, diketahui oleh makin banyak orang Cina. Bagaimanapun, sampai masa ini migrasi penduduk Cina meninggalkan negerinya masih dipandang sebagai kelakuan orang rendah dan buruk oleh Kerajaan Cina. Kalau bukan karena sengsara maka tentu mereka yang pergi merantau itu adalah bandit pelarian.

Antara 1644-1899, secara prinsipnya dinasti Ch'ing melarang kegiatan perdagangan dan perantauan orang Cina ke luar negeri, termasuk ke Nusantara (Mackie 1976: 4). Meski larangan tersebut tidak cukup efektif, sebagaimana kita lihat dengan pemberontakan orang Cina di Batavia tahun 1740 dan pembukaan tambang-tambang emas oleh perantau Cina di Kalimantan Barat pada 1750-an, namun pengaruhnya terhadap perantauan orang Cina ke Nusantara jelas ada, sekurang-kurangnya membuat ketakutan bagi calon perantau. Pengaruhnya juga dapat dilihat dari lonjakan jumlah perantau Cina setelah larangan itu dicabut, khususnya pada dekade pertama abad ke-20.

Sampai dengan pada akhir abad ke-19, migrasi orang Cina ke Nusantara memiliki beberapa ciri-ciri dominan, yaitu:

- a. Sebagian besar kalau tidak semua migran adalah kaum laki-laki, dan
- b. Sebagian besar adalah dari suku-bangsa Hokkian dari Propinsi Fujian selatan, yang
- c. Selalu punya harapan untuk kembali ke daratan Cina, dan
- d. Nyatanya sebagian besar dari mereka kawin dengan wanita setempat, lalu melahirkan anak-anak yang digolongkan menjadi *Cina peranakan*.

Menjelang akhir abad ke-19 sampai dengan dasawarsa ketiga abad ke-20, terjadi lonjakan besar migrasi orang Cina ke Nusantara. Lonjakan ini terjadi karena berbagai faktor, yang terpenting di antaranya adalah: *pertama* perubahan kebijakan pemerintah Cina terhadap para migran. Migran tidak lagi dipandang hina, tetapi malah disokong dan

dibanggakan karena banyak membawa uang masuk untuk keluarga mereka, karena itu larangan untuk meninggalkan negeri Cina dicabut. *Kedua* adalah makin maraknya pemberontakan dan kerusakan di daratan Cina.

Gelombang migrasi kali ini membawa tiga ciri-ciri penting, yaitu:

- a. Sebagian migran sudah mengikutsertakan kaum keluarga dan istri, sehingga menutup kemungkinan untuk kawin dengan wanita setempat yang melahirkan *Cina peranakan*, dan sebagai dampaknya muncullah golongan *Cina totok*.
- b. Para migran terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga mengurangi dominasi suku bangsa Hokkian,
- c. Gelombang migrasi kali ini bersamaan dengan bangkitnya rasa nasionalisme Cina yang memberikan orientasi politik lebih kental kepada negeri leluhur di kalangan migran, khususnya pada golongan *Cina totok*.

Di bawah ini dikutipkan gambaran perkembangan jumlah penduduk migran Cina di Indonesia sampai tahun 1930. Tahun 1930 adalah tahun terakhir di mana sensus penduduk di Indonesia masih boleh menggunakan kriteria suku bangsa. Angka penduduk untuk tahun 1930 ini selalu digunakan orang untuk menghitung jumlah penduduk etnik Cina di Indonesia pada masa selanjutnya dengan cara ekstrapolasi.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kelompok Etnik Cina (KEC) di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah	Daerah Sebaran
1	Awal abad ke- 19	100.000	Jawa dan Madura
2	1860	221.000	Seluruh Indonesia
3	1870	260.000	Seluruh Indonesia
4	1880	344.000	Seluruh Indonesia
5	1890	461.000	Seluruh Indonesia
6	1900	537.000	Seluruh Indonesia
7	1905	563.000	Seluruh Indonesia
8	1920	809.000	Seluruh Indonesia
9	1930	1.233.000	Seluruh Indonesia

Sumber: Dikutip dari *Statistical Pocket Book of Indonesia*, 1941, dalam Victor Purcell 1980: 386.

Dengan memperkirakan bahwa porsi penduduk kelompok etnik Cina (KEC) di Indonesia adalah sekitar 2.5 persen dari total penduduk Indonesia, Skinner menyusun satu tabel tentang persebaran penduduk KEC untuk tahun 1963, sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 2. Sedangkan pada tahun 1970, menurut perkiraan Mackie (1976: 1) terdapat sekitar 3 juta KEC di tengah 120 juta penduduk Indonesia.

Tabel 2
Persebaran Penduduk Kelompok Etnik Cina (KFC)
di Indonesia Tahun 1963

Daerah	Penduduk KEC	Penduduk Indonesia	Persen KEC
Jawa dan Madura	1.230.000	63.059.000	2.0
Sumatera	690.000	15.739.000	4.4
Kalimantan	370.000	4.102.000	9.0
Indonesia Timur	160.000	13.427.000	1.2
Indonesia	2.450.000	96.327.000	2.5

Sumber: G. William Skinner dalam Ruth T. McVey (ed.), 1963.

Dengan jumlah penduduk sebesar 200.000.000 juta pada tahun 1997, dan dengan perkiraan penduduk KEC tetap 2.5 persen, maka jumlah penduduk KEC di Indonesia untuk tahun 1997 diperkirakan sekitar 5 juta jiwa. Namun demikian, mengingat terjadinya perkawinan campur antara KEC dengan Pribumi, dan dalam setiap perkawinan campuran tersebut kemungkinan terbesar anak-anak mereka akan jadi KEC, maka jumlah tersebut adalah perkiraan minimal. Mestinya jumlahnya jauh lebih besar, tapi nyatanya tidak demikian.

Pada tahun 2000 pemerintah Republik Indonesia kembali melakukan sensus penduduk dengan mencantumkan jati diri suku bangsa. Hasil sensus tersebut telah diolah oleh Suryadinata dan kawan-kawan untuk mendapatkan jumlah KEC yang benar (Suryadinata et.al 2003: 73-101). Ternyata, karena berbagai hambatan mereka masih susah untuk mendapatkan angka tersebut. *Pertama*, dari 30 propinsi di Indonesia, hanya 11 propinsi yang mengeluarkan angka tentang penduduk KEC.

Kedua, ada banyak kesulitan baik bagi warga kelompok etnik Cina (KEC), maupun bagi petugas untuk mengungkapkan dan mengenali jati diri etnik mereka. Namun demikian, dengan berbagai cara Suryadinata et al memperkirakan bahwa penduduk KEC adalah sekitar 1.45 persen

sampai 2.04 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Prosentase ini berada di bawah keadaan tahun 1930. Secara sosiologis, penurunan prosentase ini sangat mungkin disebabkan karena mereka yang mestinya digolongkan KEC tidak lagi mau mengaku sebagai warga KEC, tapi mengaku sebagai “orang Indonesia” atau “suku bangsa” mayoritas di mana mereka tinggal.

Hal ini menjadi gejala umum setelah pemerintahan Orde Baru 1967, apalagi setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998, ketika kabarnya beberapa perempuan Cina dilecehkan secara seksual oleh oknum-oknum jahat yang tidak dikenal, khususnya di kota Jakarta. Jika dugaan tentang jumlah penduduk KEC ini benar maka kenyataan ini dapat dipakai sebagai salah satu tanda makin intensifnya proses asimilasi meninggalkan identitas keCinaan untuk menjadi Pribumi. Namun demikian, tanda ini belum dapat digunakan sebagai kesimpulan yang benar. Sebagai kelengkapan informasi, di bawah ini kami kutipkan dari Suryadinata et. al (2003) angka penduduk etnik Cina di 11 propinsi yang mencatat tentang penduduk etnik Cina. Karena keterbatasan keadaan, penulis minta maaf belum dapat menyajikan data hasil Sensus 2010.

Tabel 3
Jumlah, Sebaran, dan Konsentrasi Penduduk Etnik Cina Menurut Propinsi: Warga Negara Indonesia, 2000

No.	Propinsi	Jumlah KEC	Jumlah Penduduk Indonesia	Sebaran KEC (%)	Konsentrasi KEC
1	Jakarta	460.002	8.324.707	26.45	5.53
2	Kalimantan Barat	352.937	3.732.419	20.30	9.46
3	Jawa Timur	190.968	34.756.400	10.98	0.55
4	Riau	176.853	4.750.068	10.17	3.72
5	Jawa Tengah	165.531	30.917.006	9.52	0.54
6	Jawa Barat	163.255	35.668.374	9.39	0.46
7	Bangka-Belitung	103.736	898.889	5.97	11.54
8	Banten	90.053	8.079.938	5.18	1.11
9	Sumatra Barat	15.029	4.241.256	0.86	0.35
10	Bali	10.630	3.145.368	0.61	0.34
11	Yogyakarta	9.942	3.119.397	0.57	0.32
	Jumlah	1.738.936		100.00	

Sumber: Suryadinata, Leo; Avi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta. Indonesia's Population; Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

KEDUDUKAN HUKUM KELOMPOK ETNIK CINA DI INDONESIA

Dalam bagian ini akan dibahas kedudukan kewarganegaraan KEC di Indonesia. Dua undang-undang yang dikeluarkan oleh dua pemerintah yang berbeda, yaitu negara Tiongkok dan pemerintah Hindia Belanda, telah membuat penduduk migran Cina di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua memiliki dua kewarganegaraan secara sah. Undang-Undang kewarganegaraan Tiongkok yang diumumkan pada tahun 1909 (ditegaskan kembali tahun 1929) menyatakan bahwa semua warga migran Cina yang berdiam di Hindia Belanda sebagai warganegara Cina.

Sementara itu sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda tahun 1910 mengakui semua penduduk migran Cina yang berdiam di Hindia Belanda sebagai rakyat kerajaan Belanda. Keadaan ini merupakan hasil dari kebangkitan nasionalisme Cina pada awal abad ke-20, ketika masing-masing negara yaitu Tiongkok dan Hindia Belanda, ingin menarik kesetiaan warga Cina perantaraan ke pihak sendiri.

Sejak saat itu, hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945, setiap warga KEC di Hindia Belanda menjadi warga dari dua negara secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan istilah “dwi kewarganegaraan.” Namun dalam percakapan sehari-hari mereka masih disebut sebagai “bangsa Cina” oleh penduduk Pribumi, yaitu satu sebutan peninggalan zaman kolonial.

Pada bulan April 1946, pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka, yang dikuasai oleh Pribumi Indonesia, mengumumkan satu undang-undang kewarganegaraan yang baru, dengan *azas ius soli* dan *sistem pasif*. Di sini dinyatakan bahwa seluruh Pribumi Indonesia adalah praktis warganegara Republik Indonesia. Sementara itu golongan lain, termasuk KEC, baru akan menjadi warganegara Republik Indonesia, kalau mereka: (1) lahir di Indonesia, dan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun, dan (2) tidak menolak kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini ternyata kurang efektif menyentuh warga KEC karena kurang diketahui umum, dan pula situasi politik Indonesia masih belum menentu (Suryadinata 1978a: 113-14)

Pada awal tahun 1950, sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949, diperkirakan jumlah penduduk kelompok etnik Cina (KEC) di Indonesia adalah 2.1 juta jiwa, dan sekitar 1.5 juta punya potensi untuk menjadi warganegara Republik Indonesia karena lahir di Indonesia. Namun demikian, menurut Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, sejumlah 390.000 orang yang berpotensi itu menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Indonesia dan memilih kewarganegaraan lain. Dengan demikian yang benar-benar berpotensi untuk menjadi warga negara Indonesia hanya 1.1 juta jiwa. Alasan penolakan ini tidak dijelaskan, kemungkinan adalah ketakutan akan dijadikan tentara dan kuatir masa depan yang tidak terjamin di negara Republik Indonesia yang baru.

Pada tahun 1954 pemerintah Republik Indonesia merancang satu undang-undang kewarganegaraan yang baru.⁴ Isi dari rancangan undang-undang ini antara lain menyatakan bahwa warga KEC di Indonesia tidak dapat menjadi warga negara Republik Indonesia kecuali kalau mereka memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. mempunyai bukti bahwa orang tua mereka lahir di Indonesia, telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun, dan
2. menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Cina.

Peraturan di atas secara khusus dilakukan untuk mengantisipasi perjanjian dwi kewarga-negaraan antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia yang diadakan pada tahun 1957, dan berlaku sejak tahun 1960. Butir (2) di atas, yaitu “menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Cina,” diperlukan oleh Republik Indonesia mengingat bahwa mereka itu berpotensi untuk punya dwi kewarganegaraan, yaitu warganegara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia. Ini tidak diinginkan oleh Republik Indonesia.

Peraturan ini tentu saja ditujukan kepada kelompok KEC yang punya potensi untuk menjadi warganegara Republik Indonesia, yang pada tahun 1950 diperkirakan berjumlah 1.1 juta jiwa. Sementara itu, sisanya

⁴ Karena berbagai persoalan dalam negeri, rancangan undang-undang ini baru disahkan oleh Parlemen Republik Indonesia pada tahun 1958. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang No. 62 Tahun 1958.

yang pada tahun 1950 diperkirakan berjumlah 1 juta jiwa menjadi warga negara asing, baik karena lahir di luar Indonesia maupun karena telah menyatakan penolakan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Mereka inilah yang dikemudian hari menuai hasil dari pilihannya sendiri, yaitu mengalami kesulitan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada tahun 1957 ditandatangani satu perjanjian tentang kewarganegaraan KEC di Indonesia antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa KEC berkewarganegaraan ganda, yaitu Cina dan Indonesia, diberi waktu dua tahun untuk memilih menjadi warga negara dari salah satu negara, yang mengabaikan pernyataan ini otomatis menjadi warga negara Republik Rakyat Cina.

Skinner memperkirakan bahwa pada tahun 1960 sekitar 600.000 sampai dengan 800.000 orang (dari 1.1 juta orang yang tercatat memiliki potensi untuk menjadi warga negara Republik Indonesia pada tahun 1950) memilih menjadi warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sisanya yang 300.000 sampai 500.000 orang memilih menjadi warga negara Republik Rakyat Cina atau menjadi “*stateless*.” Mereka ini, bersama dengan 1 juta orang terdahulu yang memang merupakan warga negara RRC atau sudah menolak kewarganegaraan Republik Indonesia, memiliki status sebagai warga negara asing.

Jadi, perbandingan pada tahun 1957 itu adalah antara sekitar 600.000 sampai 800.000 ribu orang yang memilih kewarganegaraan Indonesia (WNI) berbanding dengan 1.300.000 sampai 1.500.000 orang yang memilih kewarganegaraan asing (WNA). Mereka yang memilih menjadi warga negara asing jauh lebih banyak daripada yang memilih menjadi warga negara Indonesia, termasuk Liem Koen Hian, seorang tokoh *Cina peranakan* yang kontroversial dan pro perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia memilih jadi warga negara Republik Rakyat Cina karena kecewa dipenjarakan selama beberapa bulan oleh kabinet Sukiman pada tahun 1951 (Suryadinata 1978b:108-9).⁵

⁵ Pergerakan kemerdekaan dan pembangunan sebuah negara baru selalu meminta korban dari anak-anaknya. Tan Malaka, seorang pahlawan dan pemikir besar Indonesia, ditembak mati oleh oknum tentara Indonesia sendiri pada tahun 1948 di Jawa Timur, setelah berjuang keras selama puluhan tahun untuk kemerdekaan Indonesia. Sjahrir, Natsir, Hamka dipenjarakan oleh temannya seperjuangannya sendiri, Soekarno. Sebaliknya, Soekarno disiksa oleh Soeharto di Wisma Yaso selama bertahun-tahun sebelum meninggal tahun 1970. Liem Koen Hian nampaknya tidak tahan ujian yang seperti itu (Ong Hok Ham dalam Jahja 1999: 27).

Lie Tek Tjeng, seorang pengamat masalah Cina Indonesia, memperkirakan, terdapat tiga juta orang KEC di Indonesia pada tahun 1967. Setengah dari mereka adalah warga negara Republik Indonesia, 250.000 orang adalah warga negara Republik Rakyat Cina, dan sisanya 1.250.000 orang adalah “*stateless*.” Sementara itu Direktorat Imigrasi Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 1971 terdapat 1.010.652 orang KEC yang bukan warga negara Republik Indonesia, terdiri atas 871.090 warga negara Republik Rakyat Cina, 149.486 “*stateless*,” dan 66 orang pemegang paspor Taiwan. Dengan kata lain, pada tahun 1971 itu sudah lebih dari dua juta jiwa KEC yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Angka ini dianggap terlalu tinggi oleh Suryadinata (1984: 128).

Masalah kewarganegaraan orang etnik Cina (KEC) ini terus menjadi masalah yang rumit, baik untuk dalam negeri Indonesia maupun dalam kaitan dengan hubungan diplomatik dengan RRC, meskipun kabarnya setiap bulan ada sekitar 300 orang kepala keluarga KEC yang mendapat kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1969 (Suryadinata 1978a:124). Dari taksiran mingguan *Tempo*, pada tahun 1980 terdapat sekitar tiga sampai empat juta warga KEC, lebih dari satu juta adalah warga-negara asing, yaitu 914.111 warga negara RRC, 1.097 warga negara Taiwan, dan 122.013 tanpa kewarganegaraan (Suryadinata 1999: 79).

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2000), pemerintah Republik Indonesia memberi perhatian yang lebih besar terhadap masalah kependudukan kelompok etnik Cina (KEC) ini. Salah satunya adalah pembuatan rancangan Undang-Undang Kependudukan yang baru. Di samping memperbarui Undang-Undang Kependudukan yang lama, rancangan ini juga mempertimbangkan kemudahan proses menjadi warga negara Indonesia bagi KEC. Pada tahun 2006 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 ini diharapkan masalah kewarganegaraan anggota KEC yang belum menjadi warga negara Indonesia (WNI) akan dapat diatasi secara lebih baik dan adil.

KEDUDUKAN EKONOMI KELOMPOK ETNIK CINA

Kegiatan ekonomi KEC di Nusantara sangat berkaitan dengan sejarah perantauan mereka di Nan Yang (Laut Selatan). Sejarah perantauan ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama adalah sebelum kedatangan Orang Eropa ke Nusantara, khususnya pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Melaka, dan Banten. Pada masa ini sebagian besar perantau Cina yang berkunjung ke Nusantara adalah pedagang kecil keliling, yang pada umumnya berasal dari Propinsi Fukien (daerah asal orang Hokkian) dan Kanton.

Para pedagang ini bolak-balik dari Cina ke Nusantara dengan kapal-kapal tongkang kecil. Dari Cina, mereka membawa barang-barang buatan Cina seperti sutera, porselein, lak, kertas, obat-obatan, gula, dan berbagai barang kerajinan. Sebaliknya, dari Nusantara mereka membawa pulang rempah-rempah, kayu gaharu, emas, batu akik, bahan tanaman obat-obatan, timah, sarang burung, dan berbagai binatang unik Nusantara. Pada masa jaya Kerajaan Banten di abad ke-15, diperkirakan setiap tahun 3 sampai 6 kapal tongkang datang dari Cina ke Banten.

Di samping pedagang kecil keliling ini, perdagangan dengan Nusantara juga dilakukan dengan sponsor kerajaan. Yang terkenal dari perdagangan seperti ini adalah ekspedisi-ekspedisi yang dipimpin oleh Cheng Ho. Ekspedisi semacam ini dilakukan sebanyak tujuh kali antara tahun 1405-1437. Dalam ekspedisi ini, sebagaimana dilaporkan oleh Ma Huan, mereka bertemu dengan banyak pedagang Cina yang berasal dari Fu Kien dan Kanton di pusat pelabuhan Tuban, Gresik, dan Surabaya. Selain itu mereka juga menemukan komunitas-komunitas pedagang Cina di kota-kota pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa, bahkan sarang bajak laut Cina Hokkian yang ada di Palembang (Kukang).

Jadi pada awal abad ke 15 itu, komunitas-komunitas pedagang Cina sudah tersebar di banyak kota pelabuhan terkenal di Pantai Utara Jawa. Dalam kegiatan perdagangan ini, para pedagang Cina tersebut menjalin hubungan dengan penguasa setempat karena pada masa itu, hanya kaum penguasa yang boleh melakukan hubungan dagang dengan orang luar. Penduduk Pribumi sendiri pada umumnya bekerja sebagai petani dan pengumpul hasil hutan.

Fase kedua dalam kegiatan ekonomi perantau Cina di Nusantara adalah pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menguasai Nusantara, yaitu antara tahun 1606-1799. Pada masa ini dunia perdagangan Nusantara dimonopoli oleh VOC. Hanya VOC yang boleh berhubungan dagang dengan penguasa setempat. VOC menjual barang yang berasal dari Eropa dan Jepang kepada penduduk setempat melalui kaum bangsawan, dan sebaliknya mereka membeli bahan mentah produk pertanian, perkebunan, dan hutan dari penduduk setempat. Pedagang Cina masih diberi kesempatan untuk menjual barang-barang produk Cina yang mereka bawa dari daratan Cina.

Sementara itu berbagai penduduk Cina yang bukan pedagang mulai makin banyak pergi merantau keluar dan masuk Nusantara. Di Nusantara, mereka khususnya masuk ke Batavia, di mana mereka bekerja sebagai kuli dan tukang. Mereka adalah orang-orang miskin, atau musuh negara yang dikejar-kejar pemerintah Cina. Begitu besarnya jumlah perantau Cina di Batavia pada masa itu, sehingga mereka berani mengorganisasikan satu pemberontakan melawan pemerintah VOC di Batavia pada tahun 1740.

Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh VOC dengan seketika, dan menimbulkan korban yang begitu banyak di kalangan perantau Cina tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan nama *the Chinese Massacre* (Pembantaian terhadap orang Cina). Dalam fase ini kita mencatat peristiwa penting, bagaimana posisi pedagang Cina yang mendominasi dunia perdagangan Nusantara diambil alih oleh VOC. VOC memberikan sedikit ruang dan kesempatan bagi orang Cina sebagai pedagang kecil keliling. Sementara itu, populasi perantau Cina terus meningkat naik, di Batavia khususnya dan di Nusantara umumnya.

Fase ketiga dalam kegiatan ekonomi perantau Cina di Indonesia, dimulai dengan kejatuhan VOC pada tahun 1799, dan kekuasaan politik-ekonomi Nusantara diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa ini, kegiatan ekonomi dalam skala besar, khususnya dalam bidang perdagangan, berada di tangan orang Eropa. Orang-orang Cina dan orang non-Nasrani lain tidak diperbolehkan memperdagangkan barang produksi Eropa, Amerika, dan Afrika secara langsung. Orang Cina hanya boleh menjadi pedagang perantara antara pedagang besar orang Eropa dan penduduk Pribumi.

Situasi seperti ini secara umum terlihat sampai tahun 1870, ketika sistem tanam paksa dihapus, dan liberalisasi ekonomi Hindia Belanda dimulai. Dari sini seterusnya kegiatan ekonomi pengusaha KEC kembali marak dan maju, khususnya dalam bidang industri dan perdagangan menengah. Kegiatan ekonomi KEC di Nusantara juga dapat dilihat dari segi regional. Secara umum, di Pulau Jawa perantau Cina bergerak dalam bidang perdagangan, sedangkan sebagian kecil lainnya bergiat dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hanya sedikit yang masuk ke dalam kegiatan pertambangan. Sementara itu di luar Jawa justru pertambangan dan perkebunan yang menarik banyak pengusaha Cina ini.

Posisi yang kuat dari pengusaha Eropa dalam kegiatan perekonomian di Indonesia pada zaman penjajahan dapat dimaklumi dan dianggap wajar oleh banyak orang, mengingat kekuasaan politik yang berada di tangan penjajah Belanda. Tapi, kuatnya posisi pengusaha KEC pada masa itu, sering menjadi kekaguman banyak pengamat, dan keadaan ini biasanya dianggap berkaitan secara kuat dengan jiwa kewirausahaan mereka. Mengutip dari Liem, Furnivall, dan Sutter, Leo Suryadinata (1984: 80-81) mengatakan:

Orang Eropa sebagai pedagang besar, importir dan eksportir berada di tempat teratas, pribumi selaku petani, nelayan, pedagang eceran, dan buruh di tempat terbawah, sedangkan orang Tionghoa sebagai pedagang perantara yang membagi-bagikan barang berada di tengah-tengah, melayani kedua kelompok tersebut. Dari kelompok Eropa, orang Tionghoa membeli barang-barang konsumsi dan menjualnya kepada kaum pribumi, dan dari kaum pribumi mereka membeli bahan mentah serta produksi lokal untuk dijual kepada golongan Eropa. Tidak hanya perdagangan, juga semua industri berskala besar pada umumnya berada di tangan orang Eropa, sedangkan industri skala menengah dikuasai Tionghoa.

Setelah bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, khususnya setelah tahun 1950an, pemerintah Republik Indonesia berusaha membangun kehidupan ekonomi Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan pengusaha Pribumi, yang secara tidak langsung dikuatirkan akan membawa efek kepada kelangsungan dominasi pengusaha KEC. Kebijakan ini dituangkan, pertama, dalam

“Program Benteng”, yang pemikiran dasarnya bersumber dari anjuran Mr. Assaat yaitu “Perlindungan Khusus”, disampaikan dalam Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya tanggal 19-23 Maret 1956. Isi dari proposal ini antara lain:

1. Pembinaan perusahaan milik pengusaha Pribumi dengan cara memberikan fasilitas kredit bank dan lisensi impor-ekspor secara khusus,
2. Menutup komoditi-komoditi dan pasar-pasar domestik tertentu dari penetrasi pengusaha asing dan keturunan asing, dan sebaliknya menyediakan pasar tersebut bagi pengusaha Pribumi (Kuntjoro-Jakti 1973: iv; Jahja 1991: 56-64).

Ternyata kebijakan ini tidak menggoyahkan peranan dan kekuatan dari pengusaha KEC. Hanya beberapa pengusaha Pribumi yang berhasil maju melalui program tersebut. Sebagian besar yang lain, karena kekurangan modal, telah menjual “lisensi” khusus yang mereka peroleh dari pemerintah kepada pengusaha KEC, sehingga muncullah perusahaan-perusahaan Ali-Baba. Perusahaan itu secara resmi berdiri atas nama pengusaha Pribumi, tetapi modal dan pengusahaannya adalah pengusaha Cina. Setelah itu menyusul berbagai kebijakan lain, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang yang melarang semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa dimulai sejak tanggal 31 Desember 1959.

Pada zaman “Ekonomi Terpimpin” Presiden Soekarno (1959-1965), banyak perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi dalam rangka perjuangan merebut kembali Irian Barat. Perusahaan-perusahaan ini dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada masa ini pengusaha KEC terlihat kurang mendapat kesempatan untuk bergerak dalam usaha skala besar, tapi usaha perekonomian skala menengah dan kecil tetap dalam dominasi tangan mereka.

Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Sejak tahun 1967 liberalisasi ekonomi kembali dibuka pada zaman pemerintahan Orde Baru Soeharto. Bersamaan dengan itu, pengusaha-pengusaha KEC kembali memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka, apalagi setelah pemerintah membuka pintu bagi masuknya modal asing. Para pemodal asing, demikian juga halnya dengan oknum

jenderal-jenderal Soeharto yang memperoleh banyak uang dari hasil korupsi, khususnya yang mengendalikan perusahaan-perusahaan dagang negara hasil nasionalisasi, banyak yang memilih bekerjasama dengan pengusaha KEC.

Perluasan usaha perekonomian KEC nampak berkembang pesat sejak akhir tahun 1980an. Pada tahun 1989, Gordon Redding memperkirakan 70-75 persen dari total modal swasta di Indonesia dikuasai oleh pengusaha KEC (Redding 1989). Satu hasil survai yang dimuat dalam mingguan *Warta Ekonomi* tahun 1992, mengatakan bahwa 80 persen dari 200 pengusaha terbesar di Indonesia adalah dari kalangan KEC.

Setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998, beberapa pengusaha besar KEC melarikan modalnya ke luar negeri dan *mengemplang* dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), atau menggelembungkan (*marked up*) nilai harta yang dijamin ke Bank Indonesia. Mereka telah meninggalkan masalah besar bagi ekonomi Indonesia sejak awal tahun 2000an ini.⁶

KEGIATAN POLITIK KELOMPOK ETNIK CINA

Beberapa stereotipe tentang sikap dan kedudukan KEC dalam, bidang politik dapat dikutip dari Coppel (1976: 20), yang mengatakan:

“They don’t care who hold the Southeast Asian cows, so long as they can milk them,” atau “Politics is a risky business here, above all for a Chinese; I prefer to play safe looking after my business and my family”

(“Mereka tidak peduli siapa yang memegang sapi Asia Tenggara, sepanjang mereka dapat memerah susunya,” atau “Politik adalah kegiatan yang berisiko di sini, apalagi untuk seorang Cina; Saya lebih suka cari selamat saja menjalankan bisnis saya dan menjaga keluarga”).

Stereotipe ini ingin mengatakan bahwa KEC tidak tertarik dalam bidang kegiatan politik dan hanya peduli dengan mencari duit dan mengurus keluarganya. Bagaimanapun, jika politik adalah segala kegiatan yang

⁶ Saya tidak dapat memastikan berapa banyak anggota KEC yang mengemplang BLBI. Di bagian akhir tulisan ini, saya lampirkan nama kriminal keuangan Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak 2001. Mereka seperti hilang ditelan bumi dan kasusnya seperti tenggelam. Silahkan pastikan mana yang anggota KEC dari daftar nama ini (Sumber: KOMPAS.Com, 4 Juli 2011) .

berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan wewenang, dan perjuangan mempertahankan hak-hak kelompok, maka KEC jelas pernah terlibat di dalamnya.

Leo Suryadinata dan Coppel menyoroiti gerakan politik keturunan Cina di Hindia Belanda, di Jawa, pada masa 1917 – 1942 (Suryadinata 1986; Coppel 1976). Dalam masa tersebut dikatakan terdapat tiga golongan KEC menurut orientasi politik dan kepentingan yang diperjuangkan. Golongan yang pertama disebut sebagai golongan Sin Po, sesuai dengan nama koran yang menjadi trompet pendapat mereka, yang terbentuk pada tahun 1900 dan diperkuat dalam Konferensi di Semarang pada tahun 1917. Golongan ini terutama didukung oleh Cina totok, mempunyai rasa nasionalisme Cina yang tinggi dan berorientasi ke Tiongkok. Bagi mereka, orang Cina harus tetap menjadi warga negara Cina dan setia dengan negara Cina, dan jangan ikut serta dalam sistem politik dan sistem pemerintahan Hindia Belanda.

Golongan kedua disebut sebagai golongan Chung Hwa Hui, sesuai dengan nama organisasi mereka, yang menyelenggarakan Konggres pertama pada tahun 1927. Golongan ini terutama didukung oleh Cina peranakan, rasa nasionalisme “Cina”nya agak kurang karena lahir di Hindia Belanda dan umumnya terdidik di sekolah-sekolah Belanda, dan berorientasi ke Belanda. Tujuan organisasi mereka adalah berjuang bagi perbaikan kedudukan dan keadaan orang Tionghoa di Hindia Belanda sehingga sejajar dengan orang Eropa (*gelijk gestelde*), memajukan usaha ekonomi dan pendidikan orang Tionghoa, dan memelihara dan mengkonsolidasi hubungan dengan tanah air Tiongkok. Koran yang menjadi trompet pandangan mereka adalah *Pewarta Soerabaia*.

Golongan ketiga adalah golongan Partai Tiong Hoa Indonesia, yang tidak simpati dengan golongan Sin Po maupun golongan Chung Hwa Hui. Sama seperti Chung Hwa Hui, mereka berorientasi ke Hindia Belanda, namun berbeda dengan Chung Hwa Hui mereka mengaku sebagai wakil orang Cina miskin. Kelahiran mereka bersamaan dengan maraknya perkembangan pergerakan kemerdekaan Indonesia di kalangan Pribumi Indonesia. Mereka bersimpati dengan gerakan tersebut, karena itu mereka mengalihkan gagasan tentang “kewarganegaraan Hindia Belanda” menjadi “kewarganegaraan Indonesia”. Mereka adalah golongan kecil saja di kalangan warga keturunan Cina.

Bagaimanapun, secara umum ketiga golongan politik keturunan Cina ini mempunyai titik temu dalam hal-hal yang mendasar, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan hak sosial-politik-ekonomi warga keturunan Cina di Hindia Belanda.

Perjuangan utama semua warga keturunan Cina di Hindia Belanda adalah memperoleh persamaan hak dalam segala aspek, termasuk pemilikan tanah di daerah pedesaan, dengan siapapun warga yang berkuasa di Hindia Belanda, apakah Belanda ataupun Pribumi Indonesia. Kedua adalah perjuangan untuk memperbaiki terus keadaan pendidikan dan ekonomi warga keturunan Cina. Ketiga adalah menjaga hubungan yang baik dengan tanah asal Tiongkok. Keempat adalah pemeliharaan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Cina. Dua butir yang terakhir ini telah menjadi perhatian serius pemerintah Orde Baru setelah kejatuhan Soekarno sejak tahun 1966, dan menjadi landasan bagi lahirnya konsep “masalah Cina” di Indonesia.

Sebenarnya jauh sebelum kedatangan orang Eropa ke Nusantara, para perantau Cina ini sudah terlibat dalam kegiatan politik di negara-negara Nusantara. Jika kesimpulan Slamet Muljana yang bersumberkan pada Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Berita dari Klenteng Sam Po Kong dapat dibenarkan, maka kegiatan politik sejati perantau Cina di Nusantara sekurang-kurangnya sudah mulai terlihat sejak zaman Majapahit abad ke 15.

Siapa yang disebut sebagai Arya Damar alias Swan Liong (yang menjadi wakil penguasa Majapahit di Palembang) adalah “50/50 peranakan Tionghoa, keturunan Raja Majapahit yang lahir dari Putri Cina,” kata Residen Poortman (Muljana 2005: 61). Dari ibunya yang Cina dia mewarisi watak ulet, tekun, dan pantang menyerah, sedangkan dari ayahnya yang keturunan Majapahit dia mewarisi watak priyayi dan pemimpin. Cina peranakan lain yang juga berhasil, bahkan lebih berhasil dalam menduduki kekuasaan politik tinggi di Jawa, adalah Raden Patah alias Jin Bun, penguasa tertinggi kerajaan Islam Demak sejak 1478.

Tidak kalah dalam bidang pemerintahan, orang Cina juga berhasil menjadi pemimpin bangsa Pribumi dalam bidang keagamaan. Carey dan Muljana percaya bahwa dua dari sembilan Walisongo, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Bonang, adalah keturunan Cina (Carey 1986: 16;

Muljana 2005: 100). Bahkan lebih dari itu, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati besar sekali kemungkinannya adalah juga keturunan Cina (Muljana 2005: 101-105). Semua kedudukan-kedudukan politik dan agama ini dapat diperoleh oleh para Cina peranakan ini berkat jalan yang telah dirintis oleh pejabat-pejabat Tiongkok dinasti Ming pendahulu mereka, yaitu Laksamana Sam Po Bo (Cheng Ho), Bong Tak Keng, dan Gan Eng Cu (Muljana 2005: 63-78).

Kegiatan politik migran Cina yang paling dramatis tapi juga tragis adalah Peristiwa Batavia 1740 atau juga dikenal dengan nama the Chinese Massacre atau Tragedi Berdarah Angke (Wijayakusuma 2005). Hal ini sudah disinggung juga sedikit pada bagian terdahulu. Pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Valckenier menuduh bahwa orang-orang Cina yang berdiam di sekitar kota Jakarta akan memberontak menyerbu pusat VOC di Batavia dengan bantuan penduduk Cina yang berdiam di dalam kota. Maka dilancarkanlah perang melawan orang-orang Cina tersebut dengan korban tewas yang luar biasa banyak pada orang Cina.

Hampir bersamaan waktunya dengan peristiwa ini adalah gerakan penguasaan daerah-daerah pertambangan emas di Kalimantan Barat oleh kongsi-kongsi Cina. Sebagaimana dikatakan Siahaan (1994), pada mulanya migran Cina ini diundang masuk oleh Sultan-Sultan Melayu di sana untuk dipekerjakan sebagai buruh tambang emas mulai tahun 1740. Namun setelah itu sultan-sultan tersebut tidak punya kemampuan dalam mengawasi dan menghambat kedatangan migran-migran baru dari Tiongkok yang semakin lama semakin menguasai daerah pertambangan tersebut. Melalui organisasi kongsi, orang-orang Cina tersebut berhasil mendirikan komunitas-komunitas Cina yang terlepas dari wewenang dan pengawasan para sultan. Hal ini berlangsung selama sekitar 100 tahun sampai penguasa kolonial Belanda menghancurkan kongsi-kongsi tersebut pada tahun 1850 – 1854 atas undangan para Sultan Melayu di Kalimantan Barat. Setelah itu Kalimantan Barat jatuh menjadi daerah jajahan Belanda.

Di Jawa, kegiatan politik Orang Cina tidak berhenti dengan berakhirnya Kesultanan Demak. Pada tahun 1741 para migran Cina ini mencatat terjadinya dua peristiwa penting yang memperlihatkan kemampuan politik dan perang mereka. Pertama, mereka berhasil mengepung loji utama Belanda di Semarang, dan kedua, mereka berhasil menguasai

Istana Kertasura dalam rangka membantu salah satu pihak yang terlibat dalam perang perebutan kekuasaan di Kerajaan Jawa tersebut.

Tidak hanya kegiatan politik dan perang, para migran Cina juga berhasil menarik perhatian Raja Jawa untuk menunjuk mereka sebagai pengutip cukai yang efisien. Di sepanjang Pantai Utara Jawa, tidak ada sebuah muara sungai, pelabuhan, teluk atau anak sungai yang masih dapat digunakan untuk pelayanan, yang tidak ditemukan pos-pos bea-cukai (gerbang tol) yang penjaganya adalah orang Cina (Carey 1986: 23). Ini semua belum termasuk kekuasaan politik yang dimiliki oleh para kapten Cina yang diangkat oleh pemerintah VOC dan kolonial Belanda (Lohanda 1996).

MASALAH CINA: ASIMILASI VS INTEGRASI.⁷

Kini kita masuk ke dalam bidang kultural, yaitu satu bidang yang penting dalam menentukan jati diri keCinaan dari warga KEC. Ini adalah juga merupakan satu bidang kajian yang paling sukar untuk digambarkan dan dibahas, karena berkaitan dengan ranah kognisi dan afeksi. Beberapa ciri utama dari kultur kelompok etnik Cina (KEC), seperti yang dikutip dari de Vos, adalah persamaan dalam: 1) sistem kepercayaan/religi, 2) bahasa, 3) pengalaman sejarah sebagai migran ke Indonesia, 4) asal keturunan Han, dan 5) daerah asal Tiongkok (de Vos 1982). Maka dengan lima ciri-ciri persamaan ini mereka secara subjektif mengaku, dan secara objektif diakui oleh orang lain, sebagai sebuah kelompok etnik (*ethnic group*), yaitu kelompok etnik Cina.

Membandingkan kelima unsur etnik ini dengan keadaan kultur dan masyarakat KEC pada masa kini, kita akan menghadapi satu kesulitan besar. *Pertama* adalah unsur sistem kepercayaan/religi. Dari sudut kepercayaan/religi, hampir sebagian besar warga KEC di Indonesia sudah meninggalkan religi lama, pada umumnya pindah ke agama Nasrani, apakah Kristen Protestan atau Katholik. *Kedua*, dari segi bahasa, sebagian besar warga KEC tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin, atau salah satu bahasa etnik Cina, sebagai bahasa sehari-hari. Bahkan banyak dari generasi muda KEC tidak bisa lagi berbicara dalam “bahasa” Cina, tapi fasih berbicara dalam bahasa Indonesia.

⁷ Judul sub-bab ini meminjam judul sebuah buku suntingan almarhum H. Junus Jahja (1999) yang banyak dikutip dalam buku ini.

Ketiga, dari sudut sejarah migrasi ke Indonesia, maka ini adalah keadaan masa lampau. Hampir seluruh warga KEC yang ada di Indonesia masa kini adalah kelahiran Indonesia. *Keempat*, dari sudut asal keturunan Han, inipun tidak seluruhnya benar, sebagian besar mereka adalah *Cina peranakan* yang punya tetesan darah Pribumi dari garis matrilineal, atau tetesan darah Belanda. *Kelima*, tentang asal dari Tiongkok. Hal ini hampir sama dengan sejarah migrasi, bahwa mereka mengakui nenek moyang mereka berasal dari Tiongkok, meski mereka sendiri lahir di berbagai tempat di Indonesia.

Proses kepudaran unsur-unsur kultur Cina dan penerimaan (adopsi) unsur-unsur kultur Pribumi di kalangan anggota KEC disebut sebagai proses asimilasi. Proses ini tidaklah terjadi secara merata pada seluruh perantau Cina di Indonesia. Misalnya, proses asimilasi lebih banyak dan lebih intens terjadi pada migran Cina di Jawa daripada yang tinggal di Riau atau Kalimantan Barat; lebih banyak terjadi pada kelompok *Cina peranakan* daripada *Cina totok*; dan lebih banyak terjadi pada kelompok *Cina Islam* daripada *Cina bukan-Islam*.

Perbedaan pada taraf asimilasi, agama, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain membuat masyarakat keturunan Cina di Indonesia menjadi sebuah kelompok etnik yang heterogen. Inilah yang selalu diperingatkan oleh banyak peneliti Cina Indonesia. Agar jangan berbicara mengenai KEC secara *pukul-rata*, atau melakukan generalisasi. Namun, bagaimanapun heterogenitasnya KEC, kata Suryadinata, “Sebagai sebuah kelompok etnis, Tionghoa (atau lebih tepat peranakan Tionghoa) tampaknya tidak akan lenyap” (Suryadinata 1999:101) dan “Mengabaikan pentingnya dikotomi Pribumi/Non-Pribumi adalah mengabaikan aspek utama dinamika masyarakat majemuk kontemporer” (Suryadinata 1999: 142).

Pernyataan Suryadinata ini menarik untuk ditindak lanjuti. Mengapa KEC sebagai sebuah kelompok etnik ingin tetap bertahan? Apakah hal ini terdorong oleh faktor persamaan kultur yaitu ingin menjaga kelestarian “kultur Cina” di mana pun mereka berada? Jika demikian, orientasi sosiokultur KEC adalah ke arah “Cina.” Jadi ada semacam penghargaan, kesetiaan, kecintaan yang tinggi terhadap kultur Cina.

Atau sebaliknya, dorongan itu berasal dari keinginan untuk membedakan diri dari Pribumi. Bahwa mereka adalah Cina, bukan Pribumi. Jadi

dorongan itu berasal dari satu keinginan sosiokultural untuk menolak menjadi “Pribumi.” Menjadi Pribumi adalah menjatuhkan harga diri secara sosiokultural. Karena itu, harus tolak. Meski keduanya saling terkait tidak bisa dipisahkan, seperti ayam dengan telur, tapi dari sudut sejarah, saya cenderung untuk menempatkan dorongan untuk membedakan diri dari Pribumi sebagai penggerak utama. Mengapa demikian?

Sejak dari zaman perkenalan pertama migran Cina dengan Indonesia, orang Pribumi sudah digambarkan oleh penulis-penulis Cina (misalnya Ma Huan) sebagai manusia rendah dengan wajah yang sangat buruk dan aneh. Sedangkan penulis Cina lain, Ong Tae-hae, menyebut Pribumi sebagai bangsa yang tumpul dan bodoh, para pemimpinnya tidak memahami prinsip-prinsip penalaran, dan aksaranya mirip cacing yang sedang merayap (dikutip dari Carey 1986: 21).

Pada zaman Majapahit, pemimpin-pemimpin Pribumi yang haus akan uang dan harta tapi sebaliknya sangat bodoh dalam mencari uang, dengan mudah ditipu, diperdaya, oleh pedagang-pedagang Cina, sehingga satu persatu bandar di utara Pantai Jawa jatuh ke tangan pedagang Cina tersebut. Bahkan mereka dapat mendirikan Kerajaan Demak dan menjatuhkan Majapahit. Di Kalimantan Barat, pada pertengahan abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19, seandainya tidak ditolong oleh Belanda, mungkin saja sebuah kerajaan baru berdiri di bawah kekuasaan kongsi Cina.

Pada zaman kolonial, Pribumi jatuh menjadi warga negara *inlander* kelas tiga di bawah warga negara *vreemde oosterlingen* Cina kelas dua. Sedangkan pada zaman merdeka, khususnya di zaman Soeharto, pejabat-pejabat pemerintah, termasuk polisi, jaksa, hakim, anggota DPR/MPR, menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya “dapat dibeli dengan uang,” kata Mochtar Lubis (Lubis 1978: 8; Wibisono 1991: 76-83; Kuntjoro-Jakti 1991: 84-89).

Singkatnya, apakah keuntungan dan kemuliaan yang diperoleh oleh Orang Cina seandainya mereka menjadikan diri mereka ke dalam arus utama golongan Pribumi? Tidak ada selain dari kehinaan. Karena itulah, warga keturunan Cina itu, apakah *totok* atau *peranakan*, perlu membedakan diri mereka dari Pribumi. Seterusnya, jika bukan jadi

non-Pribumi, lalu jadi apa? Pada zaman kolonial, tentu saja jadi Cina *vreemde oosterlingen*, dan sekarang menjadi warga KEC, atau etnis Tionghoa.

Sejak lama warga mantan *vreemde oosterlingen* ini diusahakan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan mungkin dapat dikatakan hampir dipaksa, untuk menjadi Pribumi, melalui jalur asimilasi. “Apa bisa? Apa mungkin? Apakah ini bukan seperti membalikkan arus air ke hulu sungai atau menolak warisan sejarah?” (Jahja 1999: 15).⁸ Dalam berbagai perkawinan campuran antara Pribumi dengan Non-Pribumi Cina dari dahulu sampai kini, sekurang-kurangnya sampai akhir zaman Orde Lama, anak-anak mereka kebanyakan tidak menjadi Pribumi tetapi terus menjadi Cina.⁹

Sejak tahun 1960an di kalangan KEC telah berkembang isu perlakuan diskriminasi rasial oleh golongan Pribumi, khususnya oleh birokrat pemerintah terhadap golongan minoritas Cina. Sebaliknya isu yang serupa dipandang oleh golongan Pribumi sebagai akibat dari eksklusifitas dan keangkuhan kelompok etnik Cina.

Semua sepakat bahwa “masalah Cina” ini harus diselesaikan, namun cara penyelesaiannya berbeda antara berbagai pihak. Cara penyelesaian pertama disebut sebagai “therapy Komunis” atau “therapy Siauw Giok Tjhan” yang dirumuskannya dalam pidato ulang tahun ke VI Baperki 13 Maret 1960 (Yayasan Tunas Bangsa 1989: 67-75). Intinya adalah bahwa struktur masyarakat Indonesia pada masa itu masih feodal, kolonial, dan kapitalis. Kemudian, karena politik “*devide et impera*” Belanda, maka golongan minoritas Cina telah dipisahkan dari tubuh masyarakat Indonesia. Tubuh itu harus diutuhkan kembali, dengan cara “integrasi” bukan dengan cara “asimilasi.” Pembicaraan hanya sampai di sini, tidak diteruskan bagaimana proses integrasi itu akan dilaksanakan.

Cara penyelesaian kedua adalah dengan “Asimilasi Yang Wajar” yang dicetuskan oleh 10 tokoh Cina peranakan. Dua di antaranya yang paling artikulatif adalah Lauwchauntho (H. Junus Jahja) dan Ong Hok Ham, yang diungkapkan dalam majalah *Star Weekly* 26 Maret 1960 (Yayasan

⁸ Mengutip Tajuk Rencana *Star Weekly* 17 Mei 1960.

⁹ Ketika membimbing seorang mahasiswa antropologi UI untuk kerja lapangan di Tangerang pada tahun 1980an, saya menemukan perkawinan-perkawinan campuran Cina-Pribumi yang cenderung menghasilkan anak-anak Cina, bukan anak Pribumi.

Tunas Bangsa 1989: 60-61). Menurut mereka masalah diskriminasi rasial dan minoritas Cina di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan jalan “asimilasi sukarela” secara aktif dan bebas, tidak dengan tindakan yang memaksa, dalam segala lapangan kehidupan. Asimilasi, menurut Ong Hok Ham, berarti menghilangkan jati diri sebagai anggota golongan minoritas Cina dengan cara, antara lain, membangun kehidupan yang tidak eksklusif dan pergantian nama Cina dengan nama Pribumi (Ong Hok Ham dalam Yayasan Tunas Bangsa 1989: 48).

Karena pemikiran ini didukung oleh kebijakan pemerintah maka ada saja pihak yang menafsirkan jalan ini secara berlebihan, antara lain adalah pemimpin kelompok integrasi, Siaowgioktjhan, yang mengatakan: “Memaksakan penggantian nama, memaksakan perkawinan campuran atau memaksakan asimilasi biologis dan memaksakan penggantian agama adalah bertentangan dengan hak-hak azazi manusia, jadi tidak demokratis dan tidak bijaksana.”

Cara penyelesaian yang ketiga adalah cara yang dipelopori oleh Yap Thiam Hien. Beliau tidak punya nama khusus untuk pola pikir ini, tapi ada yang menyebutnya dengan istilah “Integrasi non-komunis” (Yayasan Tunas Bangsa 1989: 17). Ada tiga inti pemikiran Yap Thiam Hien tentang penyelesaian masalah diskriminasi rasial dan minoritas ini. Pertama beliau menyetujui cara asimilasi seperti yang dianjurkan Kelompok 10, namun pada masa sekarang cara ini kurang tepat, karena asimilasi adalah proses dua arah, atas kemauan dua arah, Pribumi dan Non-Pribumi.

Menurut pengamatan beliau, dari pihak minoritas (Non-Pribumi Cina) kemauan itu sudah ada, tapi dari pihak mayoritas (Pribumi) belum ada. Lebih lanjut Yap Thiam Hien mengatakan, asimilasi dari minoritas ke dalam “dominant group” tidak akan mungkin terlaksana apabila minoritas saja yang merindukannya tetapi cintanya itu ditampik oleh “dominant group” (Yayasan Tunas Bangsa 1989: 110). Berdasarkan fakta-fakta sejarah, saya meragukan pandangan Yap Thiam Hien ini.

Kedua, Yap Thiam Hien nampaknya menganggap bahwa golongan dominan (Pribumi) telah diracuni oleh penyakit prasangka rasial (prejudice). Karena itu, terapi untuk masalah diskriminasi rasial dan masalah minoritas adalah dengan cara mencuci hati (heart cleansing) golongan dominan tersebut, “penghapusan prejudice,

egoisme dan hypocrisi,” sehingga “rebirth of man in Jesus Christ.” Di samping pendekatan kultural (pencucian hati), Yap Thiam Hien juga menganjurkan pendekatan hukum, yaitu melarang dan menghukum perlakuan diskriminasi terhadap suatu golongan etnis atau ras, adanya pendidikan umum tentang hak azazi manusia, dan pembuatan kebijakan publik tentang hubungan yang baik antar suku.

Ketiga cara di atas mengingatkan kembali akan adanya tiga aliran politik kelompok etnik Cina di Jawa pada zaman kolonial Belanda, yaitu aliran nasionalis Sin Po, aliran integrasi Chung Hua Hwi, dan aliran asimilasi Partai Tiong Hoa Indonesia, meskipun masing-masing tidak dapat dibandingkan secara persis. Aliran nasionalis Sin Po jelas tidak hidup lagi pada masa kini, tapi pengaruhnya masih terasa pada terapi Siaowgioktjhan, sekurang-kurangnya sampai peristiwa G30S tahun 1965. Aliran Chung Hua Hwi sedikit banyak memang mempunyai kemiripan dengan cara integrasi model non-komunis Yap Thiam Hien, khususnya dalam hal latar belakang pendidikan para pemimpinnya yang berwarna Hindia Belanda dan Nasrani. Inipun pada masa kini tinggal sejarah.

Sedangkan cara “Asimilasi Yang Wajar” dapat dikatakan sebagai satu fenomena yang jauh lebih kental asimilasinya dibandingkan dengan aliran Partai Tionghoa Indonesia. Malah satu variasi yang boleh dikatakan agak ekstrim dari gerakan asimilasi ini adalah pemikiran H. Junus Jahja yang menganjurkan asimilasi total melalui perkawinan dan perpindahan ke agama Islam. Bagaimanakah perkembangan dari proses asimilasi atau integrasi kelompok etnik Cina ini pada masa kini? Nampaknya masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih spesifik.

KESIMPULAN

Secara umum hubungan sosial antara Pribumi dengan KEC di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang positif, khususnya setelah peristiwa Mei Kelabu 1998. Integrasi dan asimilasi berkembang secara sejajar. Kesadaran orang Cina sebagai satu kelompok etnik yang khas, yang berbeda dari etnik lain, makin terlihat dalam perilaku sehari-hari. Gejala ini adalah tanda-tanda dari proses integrasi. Sebaliknya perkawinan campuran Pribumi dengan Non-Pribumi, dalam pengamatan umum, makin berkembang. Hambatan-hambatan kultural dari orang

tua yang beraliran tradisional terhadap perkawinan seperti ini semakin lemah. Gejala ini adalah tanda-tanda dari proses asimilasi.

Masing-masing pihak, Pribumi dan KEC mulai berpikir kembali tentang kedudukan masing-masing di negara Indonesia ini. Kedua pihak pun menilai ulang praduga-praduga (prejudice) yang selama ini berkembang dalam diri masing-masing. Dalam memandang dan menilai hubungan sosial Pribumi dengan Non-Pribumi Cina, orang Indonesia secara umum terasa lebih dewasa dan rasional. Makin terlihat sikap saling menghargai.

Setelah pemerintahan Gus Dur (tahun 2000an), penghargaan pemerintah dan masyarakat atas kultur Cina kembali baik. Upacara permainan Barongsai sudah kembali diperbolehkan, bahkan kini disertai oleh Non-Pribumi dan Pribumi sebagai pelakunya. Agama Konghucu sudah diakui sebagai sebuah “agama resmi” di Indonesia. Sebaliknya, isu kronisme antara Penguasa dengan pengusaha Cina sudah tidak terdengar lagi. Sikap angkuh KEC terhadap Pribumi, sebagai peninggalan zaman kolonial, pun sudah semakin menghilang. Meskipun tidak ada larangan bagi KEC untuk berbicara dalam “bahasa” Cina dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam kenyataan kita jarang menjumpai KEC Indonesia yang berbicara dalam “bahasa” Cina di tempat umum. Di samping tidak ada lagi sekolah-sekolah Cina, tempat di mana bahasa ini diajarkan pada zaman sebelum terjadinya peristiwa G30S 1965. Hal ini mungkin juga terjadi karena penghargaan KEC terhadap masyarakat dan kultur Indonesia sudah lebih baik.

LAMPIRAN.

Pelarian Indonesia Ke Luar Negeri

(Sumber: KOMPAS.Com, 4 Juli 2011).

1. **Sjamsul Nursalim**, terlibat dalam kasus korupsi BLBI Bank BDNI. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dollar Amerika. Kasus Sjamsul masih dalam proses penyidikan. Namun kasusnya dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan.

2. **Bambang Sutrisno**, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang lari ke Singapura dan Hongkong. Pengadilan memvonis Bambang *in absentia*.
3. **Andrian Kiki Ariawan**, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan kemudian memutuskan melakukan vonis *in absentia*.
4. **Eko Adi Putranto**, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis *in absentia* 20 tahun penjara.
5. **Sherny Konjongiang**, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS bersama Eko Adi Putranto dan diduga merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Pengadilan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, *in absentia*.
6. **David Nusa Wijaya**, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Servitia. Ia diduga merugikan negara sebesar Rp 1,29 triliun. Sedang dalam proses kasasi. David melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Namun, ia tertangkap oleh Tim Pemburu Koruptor di Amerika.
7. **Samadikun Hartono**, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Modern. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp169 miliar. Kasus Samadikun dalam proses kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura.
8. **Agus Anwar**, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Pelita. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 1,9 triliun. Kasusnya saat itu masih dalam proses penyidikan. Saat melarikan diri ke Singapura, ia diberitakan mengganti kewarganegaraan Singapura. Proses selanjutnya tidak jelas.
9. **Sujiono Timan**, kasus korupsi BPUI. Sujiono diduga merugikan negara 126 juta dollar Amerika. Proses hukum kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura.

10. **Maria Pauline**, kasus pembobolan BNI. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Proses hukumnya masih dalam penyidikan dan ditangani Mabes Polri. Maria kabur ke Singapura dan Belanda.
11. **GN** (mantan direktur dan komisaris PT MBG). Ia menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasus masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
12. **IH** (mantan direktur dan komisaris PT MBG). IH menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasus masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
13. **SH**, (mantan direktur dan komisaris PT MBG). SH menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasus masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
14. **HH** (mantan direktur dan komisaris PT MBG). HH menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasus masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
15. **Djoko S Tjandra**, terlibat dalam kasus korupsi Cessie Bank Bali. Kasus ini merugikan negara Rp 546 miliar. Vonis PK 2 tahun penjara. Djoko melarikan diri ke Singapura dan masuk dalam DPO.
16. **Gayus Tambunan**, terlibat dalam korupsi/suap pajak. Ia merugikan negara sebesar Rp 24 miliar. Putusan pengadilan 7 tahun penjara. Sempat kabur ke Singapura, tetapi berhasil dibujuk oleh Satgas Anti Mafia dan kembali ke tanah air.
17. **Anggoro Widjojo**, kasus SKRT Dephut. Merugikan negara sebesar Rp 180 miliar. Dalam proses penyidikan ke KPK. Anggoro lari ke Singapura dan masuk dalam DPO.
18. **Nunun Nurbaeti**, kasus dugaan suap Cek Pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Kasus Nunun saat ini dalam tahap penyidikan di KPK. Istri Adang Daradjatun ini masuk dalam DPO. Terakhir dikabarkan ia lari ke Thailand.

19. **Robert Dale Mc Cutchen**, kasus Karaha Bodas. Rugikan negara senilai Rp 50 miliar. Ia masuk dalam DPO, lari ke Amerika Serikat.
20. **Marimutu Sinivasan**, kasus korupsi Bank Muamalat. Kasus ini merugikan negara Rp 20 miliar. Masuk dalam proses penyidikan Mabes Polri. Marimutu melarikan diri ke India.
21. **Nader Thaher**, terlibat kasus korupsi kredit Bank Mandiri oleh PT Siak Zamrud Pusako. Diduga merugikan negara senilai Rp 35 miliar. Nader divonis di Mahkamah Agung 14 tahun penjara. Melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO.
22. **Lesmana Basuki**, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Lesmana divonis di Mahkamah Agung 14 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini.
23. **Tony Suherman**, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Tony divonis 2 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini.
24. **Hendra Rahardja**, terlibat kasus korupsi BLBI Bank BHS. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia divonis *in absentia* seumur hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur.
25. **Hartawan Aluwi**, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
26. **Hendro Wiyanto**, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.

27. **Dewi Tantular**, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
28. **Anton Tantular**, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
29. **Hesyam Al-Waraq**, terlibat kasus Bank Century dengan kerugian negara Rp 3,11 triliun. Ia dikabarkan kabur ke Singapura dan Inggris.
30. **Rasat Ali Rizfi**, terlibat kasus Bank Century dengan kerugian negara Rp 3,11 triliun. Ia dikabarkan kabur ke Singapura dan Inggris.
31. **Adelin Lis**, terlibat dalam korupsi Kehutanan dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 119 miliar. MA memvonis 8 tahun penjara. Ia pergi ke China dan Australia, masuk dalam DPO.
32. **Atang Latief** terlibat dalam korupsi BLBI Bank Indonesia Raya dengan kerugian negara Rp 155 miliar. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Atang melarikan diri ke Singapura. Menurut ICW, masih berstatus terduga. Masuk daftar cegal. Proses hukum tidak jelas
33. **Edy Tanzil**, membobol Bank Bapindo Rp 1,3 triliun melalui perusahaanya PT. Golden Key. Sempat mendekan di LP Cipinang namun melarikan diri pada 4 Mei 1996. Ia dikabarkan lari ke China.
34. **Hari Matalata**, terlibat dalam kasus ekspor tekstil senilai Rp 1,6 miliar. Ia divonis di MA. Ia melarikan diri ke Singapura dan masuk dalam DPO.
35. **Muhammad Nazaruddin**, diduga terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang. Diduga, negara dirugikan Rp 25 miliar. Kasus dalam proses penyidikan di KPK. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia masuk Singapura pada 23 Mei 2011, sehari sebelum Imigrasi menerbitkan surat pencekalan pada 24 Mei 2011.

36. **KKT** (Warga Negara Singapura), terlibat dalam dugaan korupsi jaringan komunikasi PT Telkom Divisi Regional Sulawesi Selatan. Ia diduga merugikan negara Rp 44,6 miliar. Kasusnya dalam penyidikan. Ia melarikan diri ke Singapura dan masuk daftar DPO.
37. **Sukanto Tanoto**, terlibat dalam dugaan korupsi wesel ekspor Unibank. Ia diduga merugikan negara sebesar 230 juta dollar Amerika. Ia lari ke Singapura. Menurut ICW, Sukanto masih terduga namun diberitakan menjadi tersangka. Proses hukum tidak jelas.
38. **Lidya Muchtar**, terkait kasus BLBI Bank Tamara. Tak tercatat asal perusahaannya. Ia melarikan diri ke China. Kasus tersebut dalam proses penyelidikan. Ia melarikan diri ke Singapura. Menurut ICW masih Lidya terduga. Masuk daftar cegal dan proses hukum tidak jelas.
39. **Hendra Liem alias Hendra Lim**, terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
40. **Hendra alias Hendra Lee**, terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
41. **Budianto**, terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
42. **Amri Irawan**, terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
43. **Rico Santoso**, terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat.
44. **Irawan Salim**, terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat.
45. **Lisa Evijanti Santoso**, terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Yunus. 1973. "Perkembangan Pola-pola Perdagangan Masyarakat Tenglang di Semarang", dalam *Prisma*, No. 3. Jakarta: LP3ES.
- Adicondro, G.Y. 1978. "Dari Pecinan Sampai Nan Yang: Suatu Introduksi tentang Kewiraswastaan Orang Cina di Indonesia", dalam *Prisma*, No. 9. Jakarta: LP3ES.
- Asy'ari, Hasyim. 2006. *Bakar Pecinan: Konflik Pribumi vs Cina di Kudus 1918*. Jakarta: Grafika Indah.
- Belwood, Peter. 1985. *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*. Sydney: Academic Press.
- Carey, Peter. 1986. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Coppel, Charles A. 1976. "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," dalam *The Chinese in Indonesia* (Mackie, ed). The University Press of Hawaii, Honolulu in association with The Australian Institute of International Affairs.
- de Vos, George. 1982. "Ethnic Pluralism: Conflict and Accomodation", dalam *Ethnic Identity*, disunting oleh George de Vos and Lola Romanucci-Ross. Chicago: The University of Chicago Press.
- Gondomono. 2002. "Pengantar: Upaya Mencari Jati Diri dan Keanekaragaman Kelompok Etnik Cina," dalam *Intisari; Pelangi Indonesia*. Jakarta: PT Intisari Mediatama.
- Hamzah, Alfian. 1998. *Kapok Jadi Nonpri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Jahja, H. Junus. 1989. *Catatan Seorang WNI*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Jahja, H. Junus. 1999. *Masalah Tionghoa Indonesia: Asimilasi vs Integrasi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran.
- Kassim Ahmad. 1975. *Hikayat Hang Tuah; Menurut naskhah Dewan bahasa dan Pustaka*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1973. "Kata Pengantar" dalam buku *Penjaja dan Raja*. Jakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1991. "Cukong dan Praktek Percukongan," dalam *Nonpri di mata Pribumi*, oleh Junus Jahja (ed.). Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Lie Tek Tjeng. 1969. *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional, LIPI.

- Lohanda, Mona. 1996. *The Kapitan Cina of Batavia; A History of Chinese Establishment in Colonial Society*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Lubis, Mochtar. 1978. *Manusia Indonesia; Sebuah Pertanggungjawaban* (cetakan ke 3). Jakarta: Yayasan Idayu.
- Mackie, J.A.C.; dan Charles A. Coppel. "A Preliminary Survey," dalam *The Chinese in Indonesia* (Mackie, ed). The University Press of Hawaii, Honolulu in association with The Australian Institute of International Affairs, 1976.
- Martosudiro, Slamet. 1973. "Penyelesaian Masalah Cina Perantauan Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan & Keamanan Nasional," dalam *Prisma*, No. 3.
- Muljana, Slamet. 2005 [1968]. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam Nusantara*. Yogyakarta: LKIS.
- Purcell, Victor. 1980. [1951]. *The Chinese in Southeast Asia* (2nd ed.). Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan. Pri-Nonpri dan Masalah Ekonomi. Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 13, 1994.
- Redding, Gordon. 1989. *The Spirit of Chinese Capitalism*. Hongkong: Billion Magazine.
- Robson, S.O. "Java at the Crossroads", dalam *BKI*, deel 137, 1981:275.
- Siahaan, Harlem. "Konflik dan Perlawanan; Kongsu Cina di Kalimantan Barat, 1770-1854," dalam *Prisma* 12, Desember 1994. Jakarta: LP3ES.
- Skinner, G. William. "The Chinese Minority", dalam buku *Indonesia yang disunting oleh Ruth McVey*, New Haven, Connecticut USA: HRAF Press, 1963. Terjemahan Indonesia makalah ini dapat dilihat dalam buku Mely G. Tan 1981.
- Statistical Pocket Book of Indonesia*, 1941, dalam Victor Purcell 1980: 386.
- Suparlan (penyunting), Parsudi. 1989. *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryadinata, Leo. 1978a. *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China; A Study of Perceptions and Policies*. Singapore: Heinemann Educational Books Ltd, .
- Suryadinata, Leo. 1978b. *The Chinese Minority in Indonesia; Seven Papers*. Singapore: Chopmen Enterprises.
- Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Suryadinata, Leo. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata, Leo; Avi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta. 2003. *Indonesia's Population; Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Tan, Mely G. 1981. *Golongan Etnis Tionghoa*. Jakarta: Gramedia untuk LEKNAS-LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Jurnal Analisa CSIS, No. 9, 1984, terbitan Centre for Strategic and International Studies, Jakarta;
- Warta Ekonomi* (1992). Mingguan terbit di Jakarta.
- Wibisono, Jusuf. 1991. "Filsafat Oei Tiong Ham," dalam dalam *Nonpri di mata Pribumi*, oleh Junus Jahja (ed.). Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Wijayakusuma, Hembing. 2005. *Pembantaian Massal 1740; Tragedi Berdarah Angke*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Yayasan Tunas Bangsa. 1989. *Lahirnya Konsepsi Asimilasi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.